

Hari/Tanggal : Rabu 29 Juni 2022

Waktu : Pukul 11.30-13-00 WITA

Tempat : Laboratorium Sejarah dan Budaya

SEJARAH PEREKONOMIAN DI BONE TAHUN 1906-1942



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Sarjana
Pada Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Hasanuddin.**

OLEH:

ANDI SYAHRUL AKBAR

F81115303

DEPARTEMEN ILMU SEJARAH

FAKULTAS ILMU BUDAYA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

SEJARAH PEREKONOMIAN DI BONE TAHUN 1906-1942

Disusun dan diajukan oleh:

ANDI SYAHRUL AKBAR

F81115303

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada tanggal 29 Juni 2022 dan dinyatakan telah memenuhi sejumlah persyaratan.



Mengetahui,

**Dekan Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Hasanuddin**



**Ketua Departemen Ilmu Sejarah
Universitas Hasanuddin**

Dr. Ilham, S.S., M.Hum.
NIP. 19760827 200801 1 011

**FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HASANUDDIN**




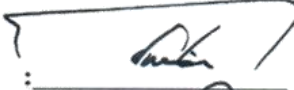
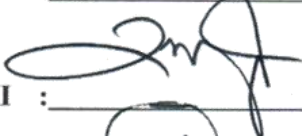

Pada hari Rabu, 29 Juni 2022, Panitia Ujian Skripsi Departemen Ilmu Sejarah telah menerima dengan baik skripsi yang berjudul:

SEJARAH PEREKONOMIAN DI BONE TAHUN 1906-1942

Yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat Ujian Akhir guna memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin.



Makassar, 29 Juni 2022

- | | | |
|------------------------------------|--------------|---|
| 1. Dr. Nahdia Nur, M.Hum | Ketua |  |
| 2. Drs. Abd. Rasyid Rahman, M.Ag. | Sekretaris |  |
| 3. Amrullah Amir, S.S., M.A., PH.D | Penguji I |  |
| 4. Dr. Suriadi Mappangara. M.Hum | Penguji II |  |
| 5. Dr. Nahdia Nur, M.Hum | Konsultan I |  |
| 6. Drs. Abd. Rasyid Rahman, M.Ag. | Konsultan II |  |

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini dengan:

Nama : ANDI SYAHRUL AKBAR
NIM : F81115303
Program Studi : Ilmu Sejarah
Fakultas/Universitas : Ilmu Budaya/Hasanuddin
Judul Skripsi : SEJARAH PEREKONOMIAN DI BONE TAHUN
1906-1942

Menyatakan dengan sesungguhnya-sungguhnya serta sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan melalui penelitian ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Makassar, Juni 2022

Pembuat Pernyataan



ANDI SYAHRUL AKBAR

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbilalamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis masih diberikan kesempatan, kesehatan dan kemampuan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Pada proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari berbagai rintangan, mulai dari pengumpulan literatur, pengumpulan data hingga pengolahan data dalam tahap penulisan.

Tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan study dan menggapai gelar “**Sarjana**”. Selama sepuluh semester berjuang dari ilmu di ruang kuliah bercengkrama dengan dosen adalah salah satu cerita menempa study di Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dari berbagai pihak. Terimakasih banyak kepada Bapak, dan Mama yang telah memberikan dorongan, dukungan serta doa restu bagi penulis. Kepada Almarhum Bapak **Andi Baso Pawellangi**. Kepada Mama **Andi Cicuwati** terima kasih sudah menjadi pengingat dan support system untuk penulis, serta Nenek **Andi Intan** dan Saudara tercinta **Andi Syahriadi Akbar** dan **Andi Syahreza Fahlevy**.

Terima kasih kepada Ibu **Dr. Nahdia Nur, M. Hum.** (Pembimbing I) dan Bapak **Drs. Abd. Rasyid Rahman, M.Ag.** (Pembimbing II) yang sabar dan ikhlas meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selain itu penulis juga menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc**, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para wakil Rektor dan para jajarannya. Serta mantan Rektor ibu **Prof. Dr. Dwie Aries Tina Palubuhu, M.A**, beserta staf dan jajarannya.

2. **Prof. Akin Duli, M.A**, selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin beserta para wakil Dekan dan para jajarannya.

3. **Dr. Ilham, S.S., M. Hum**, selaku ketua Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, Sekretaris Departemen Ilmu Sejarah Kak **A. Lili Evita, S.S., M. Hum, Dr. Amrullah Amir, S.S., M.A., PH.D** selaku penasihat akademik, serta staf pengajar Bapak **Dr. Suriadi Mappangara, M. Hum**. Ibu **Dr. Nahdia Nur, M. Hum**, Almh Ibu **Magriet Moka Lappia, S.S., M.S.**, Bapak **Dr. Muh. Bahar Akkase, Teng., Lcp., M. Hum**, Bapak **Dr. Muslimin A.R. Effendy, MA. S.S., M.A**, Bapak **Drs. Abd. Rasyid Rahman, M.Ag**, Alm. **Prof. Dr. Rasyid Asba, M.A**, Bapak **Drs. Dias Pradadimara, M.A., M.S.** Bapak **Dr. Bambang Sulistyono, M. Hum**, Bapak **Nasihin, S.S., M.A**. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama kuliah. Ilmu yang bermanfaat bagi penulis maupun bagi orang lain.

4. **Ujddi Usman Pati, S. Sos** selaku kepala sekretariat Departemen Ilmu Sejarah. Terima kasih telah banyak membantu penulis dalam administrasi kampus, mulai dari awal perkuliahan hingga selesainya skripsi.

5. Kepada semua teman-teman Fakultas **Verenigen 15** dan Jurusan **Ilmu Sejarah 2015, Max Havelaar 2015**. Terima kasih atas kebersamaannya selama kuliah, khususnya saudaraku, **A. Suci, Sukmawati, Hawaisyatul, Ibnu Khair, Dharul Aksa, Andi Fitrah**, dan **Afief**.

6. Kemudian Teruntuk **HUMANIS KMFIB-UH** yang telah menjadi rumah kedua selama saya menjadi mahasiswa, serta seluruh keluarga besar **HUMANIS**, terima kasih atas kebersamaannya. Banyak ilmu yang penulis dapatkan selama berproses Bersama. Kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk mengembangkan diri dan berbagi pengalaman diluar perkuliahan sangatlah berkesan. Kepada **Fatin Naufal, Apolonarius, Marwansyah, Fajar Siddiq, Suratman, Fitri Ramdayani, Erwin s, Yusra, Nurismi, Vivin Rindiani, Rustan, Ainun, Fahmi, Budi, Ramin, Fika Saputri, Darwan, Tristan, Widya sari Asis, Yudi S, Fajrul Abdillah. Baso Fahrizal, Faiz Rafdi, Wahyudi Burhanuddin, Suci, Dea Delyn**. Maaf pake Angkatan, untuk semua anak **Tirto 2020**. Terimakasih telah menjadi bagian dari hari-hari penulis dan membantu memberikan dukungan terhadap penulisan skripsi ini.

7. Terima kasih kalian barisan para mantan dan semua yang pergi tanpa sempat aku miliki, tak satupun yang aku sesali.

8. Tak lupa pula untuk sahabat penulis **AmateangFams; Ramdhany Maulana, Jaya Shadi, Indy Ferdiansyah, Fernando Hutagaol, Muhammad Ridwan, Ade Putra, Muhammad Qasim, Dendy Achmad, Agus Hendriawan, Kadri, Muhammad Amri, Rahmat, Zainuddin**. Yang selalu mengingatkan penulis untuk menyelesaikan skripsi.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Pada penulisan ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu dari penulis, maka dari itu diperlukan saran dan kritik yang membangun untuk penulis agar menjadi lebih baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik penulis sendiri maupun yang membacanya.

Makassar, 29 Juni 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Batasan Masalah.....	6
1.2.1. Batasan Temporal	6
1.2.2. Batasan Spasial	7
1.3. Rumusan Masalah	7
1.4. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1. Tujuan Penelitian	8
1.4.2. Manfaat Penelitian	8
1.5. Metodologi penelitian.....	9
1.6. Tinjauan Pustaka	11
1.7. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II GAMBARAN UMUM BONE.....	15
2.1 Kondisi Geografis.....	15
2.2 Kondisi Politik.....	19
2.3 Kondisi Sosial.....	33
2.4 Kondisi Ekonomi.....	38
BAB III SELAYANG PANDANG PEREKONOMIAN DI BONE	41

3.1. Perekonomian di Bone Sebelum Memasuki Era Kolonial	41
3.2. Perekonomian di Bone Setelah Memasuki Era Kolonial	47
3.3. Komoditas-komoditas Perekonomian di Bone	53
3.3.1. Beras	54
3.3.2. Jagung	57
3.3.3. Tembakau.....	59
3.3.4. Kelapa	60
3.3.5. Kopi	61
3.3.6. Gula Aren dan Kemiri.....	63
BAB IV PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN DI BONE SETELAH	
PENGUASAAN LANGSUNG.....	65
4.1. Kebijakan Pemerintahan Hindia Belanda Terhadap Perekonomian di	
Afdeling Bone	65
4.2. Reaksi Masyarakat dan Penguasa Lokal Terhadap Kebijakan Perekonomian	
di Bone.....	80
4.3. Komoditas Unggulan di Bone	87
KESIMPULAN	95
DAFTAR PUSTAKA	98

ABSTRAK

Andi Syahrul Akbar, F81115303, dengan judul “*Sejarah Perekonomian Di Bone Tahun 1906-1942*” dibawah bimbingan Dr. Nahdia Nur. M.Hum dan Drs. Abd. Rasyid Rahman, M.Ag.

Karya tulis ini menjelaskan tentang perekonomian Bone mulai dari pada masa awal Pemerintahan Kolonial Belanda tahun 1906 hingga berakhirnya pada tahun 1942. Penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran Perekonomian di *Afdeling* Bone yang sangat erat kaitanya dengan kondisi geografis dan aktivitas politik dari Pemerintah Kolonial Hindia Belanda.

Penulisan ini juga menggunakan penulisan sejarah kuantitatif yang dideksripsikan. Tahapan penulisan ini mulai dari pengumpulan sumber, kritik sumber, interpretasi hingga historiografi (Penulisan Sejarah).

Bone merupakan kerajaan yang kegiatan ekonominya berbasis agraris. Masyarakat Bone hidup dengan hasil bumi dari pertanian dan memiliki beberapa komoditas unggulan yaitu, beras, jagung, tembakau, kelapa, kopi, gula aren dan kemiri. Setelah penakhlukan kerajaan Bone oleh Kolonial Belanda, sistem pemerintahan mengalami perubahan dan berdampak terhadap aktivitas masyarakat dan perekonomian. Perkembangan kegiatan perekonomian di latar belakang oleh kemajuan infrastruktur dan pelabuhan.

Kata Kunci : Bone, Perekonomian, Kolonial, Kebijakan, Pelabuhan, Komoditas

ABSTRACT

Andi Syahrul Akbar, F81115303, with the title "*Economic History in Bone Years 1906-1942*" under the guidance of Dr. Nahdia Nur. M. Hum and Drs. Abd. Rashid Rahman, M.Ag.

This paper describes the economy of Bone from the early days of the Dutch Colonial Government in 1906 until its end in 1942. This paper aims to provide an overview of the economy in Afdeling Bone which is closely related to the geographical conditions and political activities of the Dutch East Indies Colonial Government.

This writing also uses descriptive quantitative historical writing. The stages of this writing start from source collection, source criticism, interpretation to historiography (Historical Writing).

Bone is a kingdom whose economic activities are based on an agrarian basis. The people of Bone live on agricultural produce and have several superior commodities, namely, rice, corn, tobacco, coconut, coffee, palm sugar and candlenut. After the conquest of the Bone kingdom by the Dutch Colonial, the government system underwent changes and had an impact on community activities and the economy. The development of economic activity is motivated by the progress of infrastructure and ports.

Keywords : Bone, Economy, Colonial, Policy, Port, Commodity

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Historiografi mengenai sejarah lokal di Indonesia, masih banyak menyimpan obyek kajian yang belum terungkap hingga sekarang. Dengan melakukan penelitian sejarah lokal, kita tidak hanya memperkaya khasanah sejarah nasional, namun juga memperdalam pengetahuan kita tentang dinamika sosio-kultural dari masyarakat Indonesia yang majemuk. Sejarah lokal biasanya menyangkut asal-usul pertumbuhan dan perkembangan serta kemunduran dari kelompok masyarakat lokal termasuk berbagai etnis kultural yang ada didalamnya, sehingga dapat dikatakan bahwa sejarah lokal mempunyai ruang lingkup yang terbatas dan biasanya dikaitkan dengan unsur wilayah. Meskipun cenderung memiliki ruang lingkup wilayah yang relatif sempit. Akan tetapi, tidak menjadi ukuran sebab seringkali daerah yang sempit dan kecil lebih penting sejarahnya dibandingkan dengan daerah lain yang lebih luas.¹

Sulawesi bagian Selatan, khususnya Makassar dalam perkembangannya pada awal abad ke-17 merupakan Kota Pelabuhan Internasional, Makassar menjadi pusat perdagangan yang terletak di kawasan Timur Indonesia. Kota ini sebagai titik temu antara dunia niaga belahan Timur (Maluku dan Irian Jaya), Barat (Kalimantan, Malaka, Sumatra, Jawa, Asia Selatan dan Eropa), Utara

¹ Taufik Abdullah, *Sejarah Lokal Indonesia*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press. 1985), hlm. 18.

(Philipina, Jepang, dan Cina) dan Selatan (Nusa Tenggara dan Australia).² Alur perdagangan yang meningkat berdampak juga pada kegiatan perdagangan dan perekonomian di Bone. komoditi yang diperdagangkan seperti Beras, Jagung, Kopi, Kelapa, dan Tembakau. komoditi-komoditi tersebut merupakan komoditi utama di *Afdeling* Bone.³

Tahun 1906-1942 adalah merupakan masa Pemerintahan dan kekuasaan Belanda yang seutuhnya dan menyeluruh di wilayah Sulawesi Selatan.⁴ Pada masa tersebut, Pemerintah Kolonial Belanda melakukan usaha penguasaan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan dengan mengirim dan melancarkan pasukan keseluruhan wilayah Sulawesi Selatan. Pengiriman pasukan yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Belanda dikenal dengan istilah Ekspedisi Militer (*militaire expeditie*) tahun 1905. Hal ini dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Belanda didasari juga oleh kebijakan yang diawali dengan slogan politik *eufinis* yang dicanangkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Joannes Benecditus (1904-1909) yang dikenal dengan “Politik Perdamaian” (*pasficate politiek*) kepada Gubernur Sulawesi Cornelis Alexander Kroesen (1903-1906), untuk memaksa penguasa-penguasa di wilayah Makassar khususnya dan di wilayah Sulawesi

² Nahdia Nur, Bambang Purwanto, dan Djoko Suryo, “Perdagangan dan Ekonomi di Sulawesi Selatan, pada Tahun 1900-an dan Sampai Dengan 1930-an”, dalam *Jurnal Ilmu Budaya* Vol 4 Nomor 1, Makassar, 2016, hlm. 617.

³ *Terjemahan Memori Van Overgave Controlier Bone Riattang tahun 1912-1915*, Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 2015, hlm. 27.

⁴ Edward L. Poelinggoman, *Perubahan politik dan Hubungan kekuasaan kota Makassar 1906-1946*, (Yogyakarta: Ombak. 2004), hlm. 2.

Selatan pada umumnya untuk tunduk, patuh dan menyerahkan kekuasaan sepenuhnya kepada Pemerintah Kolonial Belanda.⁵

Setelah penguasaan langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda, kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda di *Afdeling* Bone sangat mempengaruhi perkembangan perkeekonomian wilayah tersebut. Pada 1900 Pemerintah mulai menyebarkan informasi kepada kerajaan-kerajaan sekutu dan sahabat bahwa kebijakan “Pelabuhan Bebas” akan dihapuskan, dan kepada mereka akan dibebankan uang ganti rugi atas pungutan pajak impor-ekspor, cukai, pajak pelabuhan, pajak jangkat, dan ketentuan lain yang menyangkut pelayaran dan perdagangan. Ganti rugi ini, pada dasarnya, merupakan langkah politik untuk menegaskan bahwa wilayah-wilayah kerajaan sekutu dan sahabat berada di bawah kekuasaan Pemerintah Hindia-Belanda.⁶

Kebijakan tersebut tentu saja membuat kerajaan-kerajaan Bumiputra yang berdaulat menolak kebijakan itu karena akan melenyapkan sumber pendapatan dan wilayah kekuasaan mereka, termasuk dalam hal ini Bone, kendati Gubernur Sulawesi sendiri yang menginformasikan rencana tersebut dengan berkunjung langsung ke kerajaan tersebut, kemudian masih dijelaskan lagi oleh residen yang ditempatkan di Bone (sesuai surat Gubernur tertanggal 19 Maret 1900).⁷

Lantaran menolak tuntutan tersebut, Bone ditaklukkan pada 30 Juli 1905, menyusul kemudian Kerajaan Luwu, Gowa, Sidendreng, dan Wajo. Ekspedisi militer yang digelar Pemerintah akhirnya berhasil memaksa kerajaan-kerajaan

⁵ *Ibid*, hlm. 2.

⁶ Edward L. Poelinggomang, *Makassar Abad XIX*, (Jakarta: PT Gramedia, 2016), hlm. 75.

⁷ *Ibid*, hlm. 75.

berdaulat di Sulawesi Selatan untuk menandatangani pernyataan pendek. Di beberapa kerajaan taklukkan ditempatkan pejabat Pemerintah untuk menangani langsung Pemerintahan dan perdagangan, seperti di Bone, Luwu, dan Pare-pare. Di kerajaan-kerajaan lain penguasa setempat masih difungsikan.⁸

Setelah kerajaan-kerajaan pribumi ditaklukkan, Pemerintah Hindai-Belanda mengeluarkan surat keputusan tertanggal 27 juni 1906, yang isinya menyatakan bahwa mulai 1 Agustus 1906 Makassar berubah menjadi pelabuhan wajib pajak, menyusul kemudian pelabuhan kerajaan-kerajaan taklukan yang lain. Terhadap Balanipa, Majene, Pambuang, Tapalang, Cenrana, Mamuju, Sumbawa, Bima, Sanggar, dan Dompu bahkan diadakan “perjanjian tambahan” (*Supplementair*) tentang hak Pemerintah untuk memungut pajak impor dan ekspor, cukai, pajak jangkar, pajak pelabuhan dan pajak lainnya yang menyangkut pelayaran, serta hak Pemerintah untuk mengawasi pelabuhan pada, secara berurutan, 12,13,14 Agustus, 5,6 Oktober, 8 November, 22,27,30 dan 31 Desember 1905.⁹

Afdeling Bone yang merupakan salah satu penghasil komoditas unggulan di Sulawesi Selatan tidak terlepas dari beberapa kebijakan strategis yang dikeluarkan. Hal itu dibuktikan dengan hasil pendataan kepemilikan ornamen, diambil tolak ukur bahwa para kepala distrik harus mendapatkan 1000 hingga 2000 ikat padi sebagai hasil dari sawah jabatan mereka, sedangkan kepala *Onderdistrik* 800 – 1000 ikat, kepala banua 300 – 600 ikat, dan para kepala kampung 200 – 300

⁸ *Ibid*, hlm. 77.

⁹ *Ibid*, hlm. 77-78.

ikat, dimana persawahan itu dikerjakan secara rodi oleh penduduk yang tinggal di wilayah para ketua tersebut.¹⁰

Para kepala yang pada masa kerajaan memegang jabatan dan memperoleh pendapatan dari tanah – tanah jabatan, setelah tidak difungsikan lagi, perlu dikurangi jumlah tanah jabatannya, sementara kebanyakan kepala, karena memperoleh tanah yang lebih banyak telah memperoleh peningkatan pendapatan.¹¹

Selanjutnya pada masa Pemerintahan Hindia Belanda di Bone, tanah ornamen serta tanah – tanah di mana pemiliknya wajib membayar upeti, telah didaftar dan diambil alih Pemerintah swatantra, dengan tetap mempertahankan kewajiban membayar upeti. Wilayah hutan juga semuanya tetap dipertahankan, sedangkan wilayah – wilayah lainnya seperti tanah kepemilikan karena jabatan, diserahkan kepada kepala distrik yang bersangkutan. Semua kepala distrik, penanggungjawab banua dan kepala kampung mendapatkan tanah jabatan yang diambil dari tanah ornamen.¹²

Perekenomian di Bone pada saat Pemerintahan Hindia Belanda banyak didukung oleh hasil pertanian, perkebunan, maupun perikanan. Hal itu dibuktikan pada tahun 1913 dengan melimpahnya hasil pertanian dari persawahan sehingga

¹⁰ *Terjemahan Memori Van Overgave Controlier Bone Riattang tahun 1912-1915, Op.cit,* hlm. 59.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid,* hlm. 43.

Afdeling Bone berhasil melakukan swasebada beras dan mengekspornya ke Selayar, Makassar, Sumbawa, Palopo, Malili, Kendari dan Buton.¹³

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, penulis mencoba mengkaji **“Sejarah Perekonomian di Bone tahun 1906-1942”**

1.2. Batasan Masalah

Dalam melakukan penelitian penulis hendaknya melakukan pembatasan terhadap objek kajiannya. Batasan masalah dalam penelitian sejarah sendiri terbagi menjadi dua yaitu batasan temporal (batasan waktu) dan batasan spasial (batasan tempat/ wilayah). Pembatasan ini dilakukan untuk memfokuskan kajiannya serta membantu peneliti agar tidak meneliti terlalu luas baik waktu maupun wilayah. Pada penelitian ini, yang akan menjadi fokus utama dari penulis adalah perekonomian di *Afdeling* Bone pada awal abad ke-20 yaitu periode tahun 1906-1942. Peneliti akan melihat perkembangan ekonomi di *Afdeling* Bone dalam periode 1906-1942.

1.2.1. Batasan Temporal

Penelitian ini akan memfokuskan penelitiannya pada abad ke-20 tepatnya tahun 1906-1942. Penulis memilih kurun waktu tersebut karena pada periode tersebut sistem Pemerintahan di Sulawesi Selatan khususnya Bone mengalami perubahan dari sistem kerajaan ke Pemerintahan langsung Hindia-Belanda, Perubahan ini mempengaruhi kebijakan pengelolaan komoditas ekonomi yang terdapat di *Afdeling* Bone sehingga komoditas yang dihasilkan lebih baik dari sebelumnya. Selanjutnya pada tahun 1942 adalah berakhirnya

¹³ *Ibid*, hlm. 28

kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda di Sulawesi Selatan secara umum dan *Afdeling* Bone secara khusus.

1.2.2. Batasan Spasial

Batasan spasial atau batasan wilayah pada penelitian ini adalah salah satu wilayah yang memiliki pengaruh besar dikawasan Indonesia Timur yaitu wilayah *Afdeling* Bone, dengan melihat perkembangan perekonomiannya dari komoditi-komoditi yang dihasilkan maka wilayah *Afdeling* Bone merupakan salah satu produsen penghasil Beras, Jagung, Kopi, Kelapa, dan Tembakau. komoditi tersebut merupakan komoditi unggulan di *Afdeling* Bone.

1.3. Rumusan Masalah

Selain melakukan pembatasan masalah, seorang peneliti sejarah juga harus merumuskan masalah-masalah pokok dalam penelitian. Hal itu dilakukan agar mempermudah peneliti sejarah dalam mengumpulkan sumber-sumber yang relevan dan sesuai dengan topik dan periode yang ditentukan. Permasalahan yang penulis akan sampaikan dalam penelitian ini adalah perekonomian di *Afdeling* Bone setelah Pemerintahan langsung pada tahun 1906-1942. Berkaitan dengan hal ini maka penulis telah merumuskan masalah-masalah penelitian yang akan dibahas dalam penelitiannya.

Berikut adalah paparan masalah yang ingin dikaji oleh penulis:

1. Bagaimana perekonomian di Bone sebelum Pemerintahan Kolonial Belanda dan setelah Pemerintahan Kolonial Belanda?
2. Bagaimana kebijakan Pemerintah Hindia Belanda terhadap perekonomian di *Afdeling* Bone?

3. Bagaimana reaksi masyarakat dan penguasa lokal terhadap kebijakan perekonomian di *Afdeling* Bone?

1.4. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui komoditi-komoditi apa saja yang menjadi komoditi utama di *Afdeling* Bone.
2. Untuk mengetahui dampak dari kebijakan Pemerintah Hindia Belanda terhadap komoditas perekonomian di *Afdeling* Bone.
3. Untuk mengetahui kondisi masyarakat dan penguasa lokal terhadap kebijakan perekonomian di *Afdeling* Bone.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Dari segi teoritis penelitian ini diharapkan dapat mengungkap temuan yang memperkaya literatur sejarah nasional, khususnya dimensi sejarah lokal sehingga dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji dimensi yang sama.
2. Hasil penelitian ini bisa menjadi bahan bacaan sejarah, sehingga bermanfaat menambah informasi perekonomian daerah kabupaten Bone pada ahun tersebut.
3. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana strata satu di Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin.

1.5. Metodologi penelitian

Metode penelitian merupakan suatu usaha atau pekerjaan yang dilakukan peneliti untuk menemukan jalan untuk pemecahan permasalahan yang akan ditulis secara sistematis untuk menghasilkan karya ilmiah yang baik¹⁴. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang mana penulis mengumpulkan data untuk menarik suatu kesimpulan dari kejadian masa. Kunto wijoyo memaparkan beberapa tahapan-tahapan dalam penelitian yaitu pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi (kritik sumber), interpretasi : analisis dan sintesis dan yang terakhir adalah penulisan¹⁵

1. Heuristik

Heuristik merupakan kegiatan untuk mencari atau menghimpun data dan sumber-sumber sejarah atau bahan untuk bukti sejarah, seperti: dokumen, arsip, naskah, surat kabar maupun buku-buku referensi lain yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

Pada tahap heuristik ini peneliti mencari literatur-literatur kepustakaan yaitu dari karya-karya skripsi atau buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Sumber-sumber yang diperoleh dengan riset kepustakaan berguna sebagai bahan pembanding, pelengkap dan penganalisa guna memperdalam permasalahan yang dibahas. Dalam penelitian ini peneliti mendapat literatur-literatur tersebut dari perpustakaan perpustakaan diantaranya adalah Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas

¹⁴ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rieneka Putra, 1991), hlm.1-2.

¹⁵ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*,(Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), hlm. 67.

Hasanuddin, Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin. Selain buku tentu ada beberapa sumber primer berupa Arsip yang penulis dapatkan di Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Kritik Sumber

Pada tahap ini, sumber-sumber yang telah dikumpulkan selanjutnya diseleksi dan dianalisis untuk menentukan validitas dan kredibilitas. Oleh karena itu sangat diperlukan kecakapan dan kemampuan imajinatif mengenai peristiwa yang telah terjadi untuk menginterpretasi berbagai informasi dan sumber yang telah dihimpun.

Dalam tahap ini, penulis mengelompokkan sumber-sumber primer yang diperoleh dari Arsip dan sumber-sumber sekunder yaitu beberapa buku ekonomi dan berbagai buku yang masih berkaitan dengan objek penelitian.

3. Interpretasi

Pada tahap ini sumber yang terkumpul diseleksi mana yang perlu digunakan dan mana yang tidak perlu dimasukkan karena data pada masa Hindia Belanda sudah banyak yang hilang ataupun kalau ada banyak data yang di kumpulkan seringkali tidak sesuai dengan judul laporan yang ada.

4. Historiografi

Historiografi merupakan tahap terakhir dalam metode penelitian sejarah, dimana peneliti sudah menyusun ide-ide tentang hubungan satu fakta dengan fakta yang lain melalui tahap interpretasi maka langkah akhir dari penelitian ini adalah penulisan sejarah. Bentuk dari rekaman dan peninggalan masa lampau

ini akan disusun secara sistematis dengan topik yang jelas sehingga akan mudah dimengerti dengan tujuan agar pembaca mudah memahaminya.

1.6. Tinjauan Pustaka

Untuk mendukung penelitian ini, penulis juga memerlukan beberapa referensi untuk membantu penulisan seperti buku:

Buku terjemahan *Memory Van Overgave Controlier Bone Riattang Tahun 1912-1915*, buku ini sangat membantu penulis dalam mengerjakan penelitiannya karena dalam buku ini dijelaskan tentang Pemerintahan di Bone pada masa Pemerintahan Belanda, bukan hanya soal Pemerintahan, dalam buku ini juga menjelaskan tentang kebijakan, seperti peraturan yang telah dibuat pada tanggal 1 Februari 1907, melaksanakan suatu pungutan pajak, berupa pemungutan pajak oleh para kepala (*sima assaparang atuong*) dengan memperhatikan perubahan-perubahan yang ditetapkan oleh Pemerintah Belanda¹⁶, bidang ekonomi, sebagai mata pencaharian pokok dapat disebutkan: pertanian, peternakan, perdagangan(pelayaran), kerajinan, dan penangkapan ikan. Pertanian merupakan sumber utama kehidupan masyarakat. Keberhasilan pertanian menentukan seluruh kondisi ekonomi masyarakat. Pemerintah telah melakukan segala daya upaya untuk menunjang dan memperbaiki kehidupan, serta menolong memasukkan jenis budi daya tanaman baru bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan¹⁷, dan kebudayaan di daerah Bone.

¹⁶ *Terjemahan Memori Van Overgave Controlier Bone Riattang tahun 1912-1915, Op.cit*, hlm. 60-61.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 108-109.

Buku Makassar Abad XIX, buku yang diangkat dari disertasi Edward L. Poelinggomang ketika berada di Vrije Universiteit Amsterdam pada 1991 ini digunakan penulis karena dalam buku ini menjelaskan kondisi Sulawesi Selatan pada abad ke – 19 ketika Hindia Belanda menaklukkan kerajaan – kerajaan di Sulawesi agar dapat merealisasikan kebijakan wajib pajak di Makassar.

Dalam buku ini juga dijelaskan secara detail tentang bagaimana komoditas-komoditas yang ada di Sulawesi Selatan khususnya di Bone menjadi salah satu komoditas unggulan yang diperdagangkan di Pelabuhan Makassar pada zaman Pemerintahan Hindia Belanda dimana Pelabuhan Makassar menjadi pusat perekonomian di Indonesia bagian timur. Dijelaskan pula tentang pungutan-pungutan pajak dari beberapa hasil bumi maupun komoditas yang ada di Sulawesi Selatan.

Selanjutnya, penulis juga menggunakan referensi dari Jurnal Lensa Budaya vol.4 no.1, Juni 2016 yang ditulis Oleh Nahdia Nur, Bambang Purwanto dan Djoko Suryo. Dalam jurnal ini dijelaskan secara mendalam tentang kondisi perekonomian di Sulawesi Selatan pada tahun 1900-1930 yang mengakibatkan Pelabuhan Makassar semakin menegaskan dirinya sebagai pusat perdagangan dan perniagaan di Indonesia bagian timur. Jurnal ini juga menjelaskan komoditas-komoditas unggulan di Sulawesi Selatan yang pada saat itu merupakan salah satu pengekspor beras terbesar di Nusantara.

1.7. Sistematika Penulisan

Untuk menghasilkan tulisan yang tersusun secara kronologis maka dalam penulisan yang berjudul Sejarah Perekonomian di *Afdeling* Bone Tahun 1906-1942, penulis akan membaginya dalam lima bab yang dibuat secara sistematis.

Pada Bab I dijelaskan tentang pendahuluan atau latar belakang mengapa penulis mengambil judul skripsi yang diajukan. Selain itu dalam bab I ini juga menjelaskan tentang batasan masalah dan rumusan masalah. Dalam batasan masalah, penulis menjelaskan mengapa pada periode tersebut dipilih dan juga pada daerah yang dipilih. Rumusan masalah menjelaskan tentang masalah yang akan penulis kaji didalam tulisannya. Metode Penulisan menjelaskan tentang metode yang digunakan penulis selama meneliti.

Dalam Bab II memuat mengenai gambaran umum daerah *Afdeling* Bone yang berisi tentang keadaan geografis, serta kondisi politik, sosial dan ekonomi masyarakat di daerah tersebut.

Bab III akan membahas tentang situasi perekonomian di Bone sebelum dan setelah Pemerintahan Kolonial Belanda mengenai komoditas-komoditas apa saja yang ada dihasilkan di Bone pada tahun 1906 – 1942. Dalam bab ini penulis akan menjelaskan dalam tiga sub bab pembahasan.

Dalam Bab IV penulis akan membagi menjadi tiga bagian sub bab, pertama akan membahas tentang komoditas unggulan di *Afdeling* Bone. Kedua mengenai kebijakan Pemerintah Hindia Belanda terhadap perekonomian di *Afdeling* Bone, ketiga akan membahas reaksi/tanggapan masyarakat dan penguasa lokal terhadap kebijakan dari Pemerintah Hindia Belanda.

Bab V adalah hasil dari penjabaran dari bab satu sampai bab empat, maka dari situlah bisa ditarik kesimpulan oleh penulis, kesimpulan ini adalah jawaban dari rumusan masalah di atas, sekaligus menutup penelitian ini yang terangkum dalam bab akhir.

BAB II

GAMBARAN UMUM BONE

2.1 Kondisi Geografis

Bone merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Sulawesi Selatan. Secara geografis Bone terletak diantara Wajo dan Soppeng di bagian Utara, bagian Barat berbatasan dengan Barru, Maros dan Pangkajenne, bagian Selatan berbatasan dengan Sinjai, sedangkan bagian Timur yang merupakan batas alami berbatasan dengan Teluk Bone. Berdasarkan catatan historis, menunjukkan bahwa Kabupaten Bone pada masa Pemerintahan Hindia Belanda terbagi atas tiga *Onderafdeling* yaitu *Onderafdeling* Bone Utara, *Onderafdeling* Bone Tengah dan *Onderafdeling* Bone Selatan.¹⁸

Wilayah kekuasaan Bone pada awal abad 20, tampaknya kurang lebih atau seluruh wilayah Bone sekarang. Daerah ini yang terletak di Timur jazirah Selatan Sulawesi, membujur dari Utara ke Selatan sepanjang kurang lebih 100 km, serta lebarnya kurang lebih 67 km, dengan luas wilayahnya 4.530 km².¹⁹ Wilayah ini terdiri atas tanah datar, daerah perbukitan, rawa-rawa dan pegunungan. Keadaan tanahnya subur terutama daerah-daerah pegunungan. Selain itu, wilayah ini juga memiliki daerah-daerah yang terletak dibagian pesisir umumnya adalah tanah datar, seperti daerah Barebbo, Tanete Riattang, Mare, Tonra, Salomekko dan sebagian lainnya daerah datar dan berawa-rawa.²⁰

¹⁸ *Terjemahan Memori Van Overgave Controlier Bone Riattang tahun 1912-1915*, Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 2015, hlm. 27.

¹⁹ Nota Van Toelichting Betreffende Het Lanschap Bone Door M. Van Rhijn 1931, *Reel Nomor. 31 MvO serie le*, ANRI.

²⁰ Muhammad Amir, *Abdul Hamid Petta Punggawae: Profil Panglima Yang Pantang Menyerah*, (Makassar: Pustaka Refleksi, 2004), hlm. 30.

Secara astronomi, wilayah Bone terletak pada Barat Daya kaki pulau Sulawesi, berada pada posisi 119°40' dan 120°26' Bujur Timur dan 4°50' Lintang Selatan di tepi Barat Teluk Bone. Luas wilayah Bone diperkirakan sekitar 7,30% dari luas daerah Sulawesi Selatan, keseluruhannya terdiri dari daerah pesisir atau pantai yang membentang dari arah Utara ke Selatan dan daerah daratan, baik itu daratan rendah maupun daratan tinggi atau pegunungan yang cukup luas.

Daerah pegunungan yang berada di Bone sebagian besar terdapat dibagian Selatan dan Tenggara Bone, diantaranya Ponre 4690 meter, Pationgi dan Kalamisu masing-masing setinggi 757,25 meter, Tarapong 629 meter, Salakang 435 meter, Tanete dan Latempu masing-masing 386 meter, Wawodada dan Garaccing masing-masing 338,6 meter, Gunung Lawi dan Ati-Matiro masing-masing 290 meter, Gona 242 meter dan Bottoe 96,9 meter. Dibagian Utara dan Barat Daya terdapat Buwa 483,7 meter, Tamping 435 meter, Kahu 338,6 meter, Kalling, Batulappa,, Tjakkarene, Mampu, Sinri, Lapitu masing-masing 290 meter dan Silenrong 162 meter.²¹

Adapun sungai yang paling penting adalah sungai Walanae dan sungai Cenrana. Sungai utama Bone adalah Walanae yang menerima air dai gunung berapi yang terletak di Selatan Bone dan Lembah Subur yang terletak di bagian barat deretan bukit itu. Sungai Walanae berhulu dibawah Gunung Bawakaraeng mengalir dari Tenggara Bone dan daerah Soppeng. Beberapa bagian alirannya mengalir daerah Lamuru, berlanjut ke daerah Marioriwawo dan Marioriwawa dan akhirnya bersatu dengan sungai Cenrana disebelah Timur danau Tempe (Wajo-

²¹ *Ibid*, hlm. 31-32.

Sengkang). Jalur utama aliran sungai ini dari Selatan ke Utara. Mereka melebur di daerah Wajo di Cenrana sebelah Utara batas Utara Bone, yang mengalir dari danau Tempe ke Timur dan di Ibukota Bone Utara Pampanua pada mulanya mengikuti batas antara Wajo dan Bone, kemudian membelok ke Selatan dan membentuk delta besar yang kemudian bermuara ke laut.²²

Sungai Cenrana sepanjang tahun bisa dilayari bagi para pelaut sampai Pompanua. Pada air tinggi, Sengkang di aliran Timur danau Tempe bisa dicapai. Bagian Utara Bone (*Onderafdeling* Bone Utara) dibentuk dengan lembah sungai Cenrana, membentang di sebelah timur delta tempat Palima berada. Di sepanjang sungai ini ekspor produk utama daerah ini adalah jagung. Jumlah terbesar jagung ditanam di Selatan danau Tempe sebagai daerah sungai Walanae yang terbentang subur di daerah rawa dan lembah Cenrana. Di Bone Tengah, lembah Lanca membentang ke Selatan dari lembah Cenrana. Lembah ini sangat subur dan beririgasi baik.

Antara lembah Walanae dan pantai membentang deratan bukit yang sebagian tertutup dengan kapur dimana sejumlah sumber air memasok sungai-sungai kecil yang mengalir menuju Timur. Salo Pattiro yang berasal dari pegunungan Ponre yang terletak di Bone Tengah dipantai berpisah menjadi dua cabang dan dengan demikian perbukitan ujung Pattiro menjadi sebuah pulau. Daerah yang terletak lebih ke Selatan dibagi dibagi dengan deretan bukit kecil dalam lembah (atau kolam sungai). Disini, seperti daerah irigasi lembah Cenrana dan ditempat lain sangat banyak pembukaan sawah dilakukan. Kolam sungai

²² L. Van Vuuren, *Percobaan Monografi dan Geologi*, (Jakarta: Kantor Ensiklopedi: 1920), hlm. 451.

paling utama adalah lembah Salo Kaju, Salo Suneba dan Salo Sabaluang yang mengalir di sepanjang Ibukota Bone Selatan, disana lalu berbelok ke Selatan dan setelah membentuk sebuah delta, mengalir keluar menuju Salangketo. Di daerah aliran Salo Tabuna, dekat dengan perbatasan Balanipa, sebuah kanal banjir digali yang disini mengairi lembah. Kanal itu membuka hubungan dengan sungai Tangka di Balanipa, sehingga daerah itu juga menerima keuntungan proyek pengairan. Bagian selatan *Onderafdeling* Bone Selatan, terdapat daerah perbukitan yang mencapai Pantai di Ancu.

Selain itu, ada juga usaha untuk membuka hutan jati dalam tanaman kontrak ataupun dalam kerja bebas karena biaya tinggi tidak memberikan hasil yang diharapkan. Misalnya wilayah di Salomeko dan Tonra. Di Pamana tanah pertama dibuat sesuai bagi tujuan itu lewat sarana rabuk. Daerah sumber yang terletak di Ponre dari sungai Palaka dan Pattiro sangat penting bagi perawatan hutan.

Di hutan yang muncul disana penduduk memiliki ribuan pohon aren dimana mereka terikat pada hutan ini dan juga ingin membuka ladang. Mengingat pertanian ladang yang tidak luas didaerah ini, persediaan air (juga dataran rendah) akan dirugikan, aturan-aturan dibuat untuk mencegah konflik. Namun juga dengan tujuan untuk meningkatkan pertanian ladang di distrik Ponre percobaan dilakukan dengan pohon dadap yang pada awal penghunian pertama di ladang ditanam dengan tujuan segera setelah meninggalkan tanah atas tanaman yang lebih baik ditemukan tanah. Percobaan ini juga dilakukan sehubungan dengan kenyataan bahwa (sejak tahun 1932) dalam daerah sumber air di Ponre

pembukaan lahan tidak lagi diijinkan. Karenanya juga dicoba mendorong penduduk untuk membuka sawah (biasanya dengan lahan lain). Kondisi ini juga akan memanfaatkan pohon aren, karena kesulitan pembukaan ladang akan mendorong penduduk mencari tempat lain bagi pangan yang diperlukan. Di daerah aliran Walanae muncul hutan Ongko yang bisa dirawat.²³

Dalam sistem jalan di Bone, belakangan ini perbaikan pesat terjadi. Jadi jalan Watampone – Makassar, melalui Camba kini cocok bagi lalu lintas mobil. Sejak titik di ujung Lamuru di Walanae tidak bisa dilewati, ketika disana sebuah jembatan permanen dibangun, hubungan komunikasi kota-kota tersebut terjamin. Juga hubungan dari Watampone dan Palopo serta Soppeng jauh lebih baik, karena di Kera dan Cabenge jembatan permanen dibuat. Mengenai jalan mobil bagi suatu daerah seperti Bone, bisa terbukti dari kenyataan bahwa panjang jalur lewat darat dari Watampone ke Makassar sekitar 300 berkurang sampai 174 Kilometer. Bagi lalu lintas dari Soppeng dan Wajo ke Makassar trayek ujung Lamuru (Bone) – Cabenge (Soppeng) memiliki arti penting. Jalan ini semakin berkembang menuju jalur perhubungan penting, dia baru sejak tahun 1931 dinyatakan sebagai jalan klas satu dan masih menuntut perbaikan mendasar, baik dengan pergantian jembatan kayu lewat proyek perbaikan permanen seperti dengan penerapan pelapisan jalan di lembah perbukitan Bone.

2.2 Kondisi Politik

Memasuki dekade kedua dan ketiga abad XIX suasana di Sulawesi Selatan khususnya kerajaan–kerajaan lokal di daerah dalam kondisi yang serba keragu-

²³ *Ibid*, hlm. 453.

raguan. Hal ini terjadi karena pada satu sisi, Belanda gencar melakukan penetrasi dan bujukan–bujukan untuk mengakui kekuasaan Belanda dengan memperbaharui Perjanjian Bungaya. Sementara dipihak lain, kerajaan-kerajaan lokal ini tidak memiliki kekuatan militer seperti yang dimiliki oleh Belanda, tetapi mampu ditentang oleh kekuatan Kerajaan Bone yang juga gencar melakukan pendekatan geneologis yang sudah berjalan lama. Sehingga dalam perkembangannya terjadi persekutuan pada satu pihak dan persaingan di lain pihak, baik secara politik maupun kebijakan ekonomi perdagangan maritim.²⁴

Belanda pada masa-masa itu diperhadapkan dengan sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Selain menyelesaikan persoalan Kerajaan Gowa, pihak Pemerintah Belanda juga menghadapi sikap penolakan kehadirannya dari pihak kerajaan Bone. Sikap Pemerintah Bone ini tentu berkaitan pula dengan tindakan politiknya pada periode Kompeni merebut Provinsi Bagian Utara (Noorder Provincie), ketika terjadi gerakan Batara Gowa I Sangkilang. Setelah itu Kerajaan Bone giat memperluas pengaruh kekuasaan hingga kewilayah Malusetasi dan membuka bandar baru di Bacukiki yang disebut Parepare. Dalam hal ini diperkirakan bahwa Pemerintah Bone pasti akan melakukan tindakan balasan sehingga dengan tegas menentang kehadiran Pemerintah Belanda.²⁵

Sampai pada akhir abad XIX, secara politik wilayah Pemerintahan Sulawesi Selatan dan Daerah Bawahnya dikategorikan dalam tiga bentuk.

²⁴ Thamrin Mattulada, *Kuasa Penjajah: Imperialisme Belanda di Kerajaan Bone 1906-1931*, (Makassar: Pustaka Sawerigading, 2015), hlm. 29.

²⁵ Edward L Poelinggomang, *Perubahan Politik dan Hubungan Kekuasaan: Makassar 1906-1942*, (Yogyakarta: Ombak, 2004), hlm, 34.

Pertama, daerah yang berada didalam kekuasaan langsung yang disebut “wilayah Pemerintahan” (gouvernement landen), yaitu, Distrik Makassar (District van Makassar), Distrik-distrik bagian Utara (Noorder Districten) yang meliputi daerah Maros dan Pangkajene, Distrik-distrik bagian Selatan (Zuider Districten) yang meliputi Bantaeng, Bulukumba dan Selayar. Pelaksanaan Pemerintah di daerah ini dijalankan oleh para pejabat Pemerintah Belanda.²⁶

Kedua adalah daerah kekuasaan yang tidak diperintah secara langsung. Wilayah yang demikian itu disebut “kerajaan pinjaman” (leen vorstendom). Disebut demikian karena pelaksanaan Pemerintah di kerajaan-kerajaan yang dikuasai langsung itu, dipinjamkan kepada penguasa lokal tradisional. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil oleh raja, terutama yang menyangkut hubungan dengan kuasa asing harus mendapat persetujuan Pemerintah Hindia Belanda. Kerajaan-kerajaan yang masuk kategori ini adalah kerajaan Tallo, Tanete, Parepare, Wajo, dan Bone.

Ketiga adalah kerajaan-kerajaan sekutu (bondgenootschappelijke landen). Kerajaan-kerajaan ini merdeka dan berdaulat, namun di wilayah itu ditempatkan penguasa Kolonial sebagai pelindung dan perantara. Hal ini tertuang dalam salah satu isi Perjanjian Bungaya 1667 yang menempatkan Belanda sebagai penengah jika terjadi sesuatu masalah. Pangakuan kedudukan pihak Pemerintah Kolonial itu, memberikan kekuatan bagi Pemerintah Kolonial Belanda posisi sebagai protektor terhadap kerajaan-kerajaan sekutu. Namun bagi kerajaan-kerajaan

²⁶ Sartono Kartodirjo, dkk, *Ikhtisar Keadaan Politik Hindia Belanda Tahun 1839-1848*, (Jakarta: ANRI, Penerbitan Sumber-sumber Sejarah No.5, 1973), hlm. 263.

sekutu, kedudukan itu berarti kesetaraan antara Pemerintah Kerajaan dan Pemerintah Kolonial Belanda.²⁷

Hal itu berakibat senantiasa terjadi reaksi perlawanan apabila pihak Pemerintah Kolonial mencoba mencampuri urusan politik kerajaan. Daerah – daerah itu adalah Kerajaan Gowa, Soppeng, Luwu, Barru, Toraja, kerajaan-kerajaan kelompok Ajataparang (Sidenreng, Rappang, Suppa, Sawito, dan Alita), kerajaan-kerajaan di Mandar (Pitu Babana Binanga dan Pitu Ulunna Salu), kerajaan-kerajaan kelompok Malusetassi (Soreang, Bacokiki, Bojo, Nepo,, dan Palanro), Toraja, Buton, dan kerajaan lainnya yang tidak tergolong dalam daerah kekuasaan langsung dan kerajaan pinjaman.²⁸

Kenyataan politik itu mendorong Van Heutzs, ketika tampil menggantikan Gubernur General Willem Roosenboom (1899-1904), mencanangkan politik pasifikasi dengan langkah-langkah militer. Menurut Dirk Fock, tindakan militer perlu dilakukan karena penguasa lokal (para raja-raja) tidak mentaati perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Selain itu, para bangsawan dipandang tidak berlaku adil terhadap rakyatnya. Menurut Cramerm Permerintah Hindia Belanda berkewajiban melakukan tindakan militer karena bertanggung jawab atas kepulauannya. Pernyataan-pernyataan itu seakan-akan membenarkan tindakan militer yang dicanangkan oleh Gubernur General Van Heutzs sebagai tugas suci

²⁷ Suriadi Mappangara, *Efek Domino Rumpa'na Bone*, (Makassar: Laboratorium Sejarah dan Budaya UNHAS, 2018), hlm. 4.

²⁸ *Ibid*, hlm, 5.

untuk mengadakan, memajukan, dan memasalahkan penduduk lokal, sesuai rumusan Politik Etis Kabinet Abraham Kuiper pada tahun 1901.²⁹

Pada tanggal 14 Juli 1905 dikirim sepucuk surat kepada Gubernur Sulawesi Selatan, Cornelis Alexander Kroesen (1903-1906). Surat itu berisi perintah untuk melakukan tindakan penaklukan dan penguasaan langsung seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Selain itu diminta agar seluruh penguasa lokal untuk mengakui kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda dengan menandatangani “pernyataan pendek” (Korte Verklaring) dalam waktu yang singkat, Isi pokok dari pernyataan pendek itu adalah pihak penguasa kerajaan berjanji mengakui kedudukan kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda atas wilayah kekuasaannya dan menunjukkan kesetiaan dan ketaatan atas segala peraturan dan kebijakan Pemerintah serta memandang musuh Pemerintah juga musuh mereka dan sahabat Pemerintah juga menjadi sahabat mereka. Untuk mewujudkan keinginan itu, pihak Pemerintah Hindia Belanda mempersiapkan dan melaksanakan penaklukan atas kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan.³⁰

Sepanjang peristiwa di abad XIX, Pemerintah Hindia Belanda mulai menaruh curiga pada setiap tingkah laku politik yang dimainkan kelompok bangsawan di Sulawesi Selatan, khususnya di kerajaan Bone. Bagi Belanda, kelompok bangsawan di Bone sulit untuk dapat dimengerti dalam hubungannya dengan Belanda. Pemerintah Hindia Belanda memandang bahwa kelompok bangsawan yang menguasai wilayah ini sejak beberapa ratus tahun yang lalu, menjalankan kekuasaannya dengan menyengsarakan rakyatnya.

²⁹ Edward L Poelinggomang, *Op Cit*, hlm. 42.

³⁰ *Ibid*, hlm. 44.

Pandangan yang demikian itu bukannya tanpa dasar. Dalam kenyataannya, kelompok bangsawan memiliki hak-hak istimewa yang harus dipenuhi oleh rakyat. Hak-hak itu dipandang sebagai satu cara eksploitasi yang dilakukan oleh kelompok bangsawan melalui pendekatan budaya. Hal ini berlangsung lama dan berjalan tanpa mengalami hambatan yang berarti.

Ada beberapa kewajiban yang dibebankan kepada masyarakat yang dipandang sebagai sesuatu yang membuat rakyat sengsara. Upeti, penarikan pajak yang tidak jelas, bekerja tanpa upah, pengerahan tenaga, adalah diantara beberapa kewajiban yang dilakukan oleh rakyat untuk kepentingan bangsawan. Untuk menghilangkan itu semua, kekuasaan bangsawan harus dihilangkan. Kelompok bangsawan harus dikekang kekuasaannya jika mungkin dihilangkan sama sekali. Jabatan-jabatan tinggi di pusat kerajaan yang diduduki oleh elit bangsawan Bone harus dihapuskan. Setelah Pemerintah Hindia Belanda berhasil menguasai seluruh kerajaan yang ada di wilayah ini, mereka kemudian memperkenalkan apa yang dinamakan Sistem Pemerintahan Modern.

Sistem Pemerintahan Modern itu telah memicu perlawanan dari kelompok bangsawan yang terusik dengan Pemerintahan moderen itu. Tidak lama setelah Kerajaan Bone dikuasai, muncul perlawanan yang dilakukan oleh Daeng Pabarang. Gerakan yang dilakukan oleh Daeng Pabarang ini, mendapat dukungan yang luas. Gerakan perlawanan yang dilakukan juga memicu munculnya sejumlah gerakan lain di banyak wilayah di daerah ini. Akhirnya, Pemerintah Hindia

Belanda tidak berjalan seperti yang diharapkan. Kepatuhan rakyat tidak dapat dirangkulnya.³¹

Kondisi yang demikian itu, membuat mereka akhirnya memutuskan untuk memulihkan kembali jabatan raja. Mereka memutuskan untuk mengangkat seorang raja. Pada tahun 1931, seorang raja diangkat dan dilantik dikerajaan Bone. Pada tahun 1936, seorang raja diangkat dikerajaan Gowa. Semuanya ini dilakukan karena Pemerintahan Hindia Belanda tidak dapat berjalan dengan baik. Pengangkatan kembali seorang raja adalah cara yang dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda untuk merangkul kepatuhan rakyat, yang memang dalam kepercayaan mereka bahwa yang berhak memerintah adalah raja dari kalangan bangsawan yang dianggap memiliki turunan darah tomanurung.

Kerajaan Bone terbentuk karena adanya perjanjian antara ke tujuh penguasa wilayah dengan To-manurung. Perjanjian yang dibangun itu menempatkan To-manurung sebagai raja pertama di Kerajaan Bone. Perjanjian itu merupakan alat legitimasi bagi raja-raja Bone selanjutnya untuk tetap dapat bertahan. Dalam perkembangannya kemudian, muncul dua kelompok. Kelompok pertama dikenal dengan kelompok bangsawan, terdiri atas keturunan *To-manurung*, sedangkan kelompok kedua adalah kelompok orang biasa. Untuk tetap dapat berkuasa, kelompok bangsawan menggariskan beberapa ketentuan yang harus dipatuhi, di antaranya perkawinan. Kelompok bangsawan hanya diperkenankan untuk menikah dengan kelompok bangsawan sendiri.³²

³¹ Suriadi Mappangara, *Efek Domino Rumpa'na Bone, Op.Cit*, hlm. 7.

³² Suriadi Mappangara, "Bertahannya Bangsawan Bone Di Tengah Perubahan Rezim 1811-1946", dalam *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 2011 Edisi XXXVII No. 1, hlm. 182.

Perubahan status Kerajaan Bone sehubungan kekalahannya baik langsung maupun tidak langsung, membawa dampak besar dalam Pemerintahan tradisional di Kerajaan Bone. Keterbatasan para penguasa kerajaan untuk bertindak, karena terikat atas perjanjian yang ditandatanganinya bersama Belanda, juga diikuti dengan peran yang makin besar dari pihak Pemerintah Hindia Belanda dalam mengatur jalannya kekuasaan di kerajaan ini. Di lain pihak, para penguasa di Kerajaan Bone juga membutuhkan tindakan nyata, untuk menunjukkan keberadaannya. Mereka secara moral berpihak kepada masyarakat, sebagai satu kewajiban yang secara tradisional harus diwujudkan agar keberadaan mereka tetap mendapat tempat di masyarakat.

Perubahan sikap Pemerintah Hindia Belanda dalam memandang tanah jajahannya di akhir abad XIX, terutama daerah-daerah yang berada di luar Pulau Jawa, diwujudkan dengan kecenderungan untuk menguasai secara langsung pos-pos tertentu yang dianggap dapat memberi keuntungan ekonomi bagi Pemerintah Hindia Belanda. Demikianlah yang dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda, yang ingin menguasai Pelabuhan Pallime yang berada di Kerajaan Bone. Keinginan Belanda itu mendapat penolakan oleh raja Bone, La Pawawoi Karaeng Segeri, yang mengakibatkan pecahnya perang antara dua kuasa tersebut.³³

Hubungan antara kedua kuasa ini mulai meruncing ketika La Pawawoi tanpa sepengetahuan Pemerintah Hindia Belanda mengirim pasukannya ke Tana Toraja untuk membantu rakyat Toraja dalam mempertahankan diri dari gangguan penguasa-penguasa Enrekang. Selain itu hubungan yang kurang harmonis juga

³³ *Ibid*, hlm 199.

muncul ketika Pemerintah Hindia Belanda mencoba menguasai Pelabuhan Bajoe dan Pallime, terutama dalam hal penarikan pajaknya. Usaha ini tentu saja mendapat tantangan dan Kerajaan Bone menolak mentah-mentah keinginan Pemerintah Hindia Belanda itu. Sebab selama ini pemasukan utama kerajaan adalah dari penghasilan pajak yang dipungut dari kedua pelabuhan itu. Sikap Kerajaan Bone yang menolak keinginan Belanda memicu konflik antara keduanya. Pemerintah Hindia Belanda merasa bahwa apa yang dilakukan oleh Kerajaan Bone telah menyalahi kesepakatan yang telah dibangun sebelumnya. Oleh karena itu Pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk memaksakan kehendaknya.

Kerajaan Bone beranggapan bahwa tuntutan Pemerintah Hindia Belanda adalah sesuatu yang tidak masuk akal dan hanya mencari-cari alasan untuk menyerang Kerajaan Bone. Bagi Pemerintah Hindia Belanda, tuntutan untuk menarik pajak pada dua pelabuhan itu dianggap masih wajar mengingat status dari Kerajaan Bone sebagai Kerajaan Pinjaman. Dua titik pandang yang berbeda ini menjadi cikal bakal lahirnya konflik yang kemudian meletus menjadi perang besar pada tahun 1905 (*Lontarak Rumpakna Bone*).³⁴

Pada bulan Juli 1903, van Hoeffell diganti oleh C.A. Kroesen yang tampaknya memiliki haluan politik yang lebih keras dan lebih ambisius untuk meluaskan wilayah imperium Belanda. Pada bulan Juni 1903 terdengar desas-desus permusuhan yang ditujukan pada Bone. Rakyat Bone menunjukkan

³⁴ *Ibid*, hlm. 200.

kemarahan ketika pada bulan Juli diberitakan bahwa Pemerintah Hindia Belanda akan menurunkan rajanya.

Secara umum imperialisme Belanda dapat dibagi atas tiga bagian. *Pertama* dikenal dengan masa imperialisme ragu-ragu yang berlangsung antara 1873-1894/95. Imperialisme ini ditandai dengan Perang Aceh. *Kedua* adalah masa pertumbuhan yang berlangsung antara tahun 1894/96-1909, dan *ketiga* adalah antara tahun 1909-1915. Masa pertumbuhan mencapai puncaknya pada masa Pemerintahan Gubernur Jenderal J.B. van Heutsz (1904-1909), ditandai dengan kebijakan Aceh yang baru sejak tahun 1896, penegakan kekuasaan Belanda di Papua tahun 1898, ekspedisi ke Jambi 1901-1907 dan Kerinci 1902, Borneo Tenggara 1904-1906, Sulawesi Selatan 1905-1907, Bali 1906, Flores 1909 dan bagian lain kepulauan ini.³⁵

Pada tanggal 20 dan 27 Juli serangan dilancarkan ke atas Bajo. Setelah berlangsung beberapa hari, serangan memamatkan dilancarkan pada tanggal 27 Juli. Serangan itu sendiri mendapat perlawanan dari pasukan Bone. Dalam catatan arsip Belanda, perlawanan yang dihadapi oleh Belanda di daerah ini merupakan perlawanan yang cukup berat.

Setelah berhasil menaklukkan Bone, serangan militer Belanda selanjutnya ditujukan kepada Kerajaan Luwu dan Gowa. Dua kerajaan yang memiliki hubungan keluarga dengan Kerajaan Bone. Belanda sangat yakin bahwa tanpa menaklukkan Luwu dan Gowa, jatuhnya Bone belum menjamin kemenangan

³⁵ Elsbeth Locher-Scholten, *Excursions in Celebes*, (Leiden: KITLV Press, 1991), hlm. 25.

Belanda di Sulawesi Selatan. Meskipun mendapat perlawanan, namun akhirnya kedua kerajaan ini harus tunduk kepada Pemerintah Hindia Belanda.

Asisten Residen Bone yang memerintah dari tahun 1907 sampai 1909, merumuskan keadaan yang dihadapinya di Bone sebagai berikut :

“Sejauhmana para kepala berada di bawah kendali kita, sulit untuk dinilai. Juga disebutkan bahwa para bangsawan yang dahulu berkuasa dan kini terikat tetap memilih kondisi lama daripada kondisi sekarang. Pertanyaan tentang kesetiaan mereka juga tidak menyangkut masalah apakah mereka lebih menyukai kondisi sekarang daripada sebelumnya, namun ini menyangkut apakah mereka siap dalam cara Pemerintahan sekarang untuk menerimanya, karena beberapa saat yang lalu mereka mencoba melawan. Pada umumnya para bangsawan menurut dugaan bisa dianggap terpercaya. Mereka bersedia bekerjasama untuk melaksanakan aturan-aturan baru, untuk membuat jalan dan jembatan, untuk menangkap para penjahat, namun tidak pernah memberikan bantuan dalam menangkap mereka yang telah memberontak melawan Pemerintah” (IJzeeref 1994).

Penguasa sipil J. Doerlleben, yang memerintah dari tahun 1910-1913, mengakui bahwa kelompok bangsawan Kerajaan Bone statusnya sudah tidak sama lagi seperti yang mereka nikmati sebelum serangan tahun 1905. Meskipun di sana-sini ada upaya yang dilakukan oleh kelompok bangsawan tinggi untuk bangkit karena ketidaksetujuan mereka terhadap keadaan yang dialami, namun upaya mereka tampaknya terpendam karena ganjaran yang mereka hadapi sehubungan dengan usahanya itu akan berakibat fatal, tidak saja dirinya sendiri tetapi juga bagi keluarganya.³⁶

³⁶ *Ibid*, hlm. 35.

Ketika struktur Pemerintahan di wilayah Kerajaan Bone ditata ke dalam beberapa distrik, Pemerintah Hindia Belanda mengangkat dan menempatkan mantan anggota *Dewan Adat Pitu* untuk mengepalai beberapa distrik. Usaha itu dilakukan untuk meredam kemungkinan munculnya gejolak dari kaum bangsawan yang merasa tidak puas. Penataan yang dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda tampaknya kurang berhasil dan tidak bertahan lama. Kepala distrik di banyak tempat tidak dapat melakukan tugasnya dengan baik. Hal ini berkaitan dengan wibawa dan pengaruh yang dimilikinya tidak cukup kuat untuk dapat menjalankan tugasnya.

Pemerintah Hindia Belanda kurang menyadari bahwa dalam struktur Pemerintahan tradisional di bekas Kerajaan Bone, terdapat sejumlah *wanua* yang memiliki otonomi yang besar yang memiliki hubungan dengan pusat Pemerintahan dengan memberikan upeti sebagai tanda bahwa daerahnya adalah bagian dari Kerajaan Bone. Dalam banyak hal mereka sebenarnya merdeka. Kehidupan mereka diatur sendiri oleh kepala daerahnya. Mereka hanya membayar upeti sebagai bagian dari Kerajaan Bone, tetapi bukan sebagai daerah yang dijajah.

Mereka menggabungkan diri pada pusat kerajaan semata-mata karena nama besar yang dimiliki oleh kerajaan Bone. Nama besar itu setidaknya dapat menyelamatkan daerahnya dari gangguan kerajaan-kerajaan besar lainnya yang sewaktu-waktu dapat membahayakan mereka. Demikianlah yang terjadi pada daerah Lamuru yang pernah mendapat serangan dari Kerajaan Soppeng. Raja

Bone kemudian menyerang Soppeng dan memperingatkan bahwa Lamuru adalah wilayah Kerajaan Bone.³⁷

Di samping itu ada juga daerah yang hanya diberi tugas untuk menyediakan kayu misalnya untuk kepentingan kerajaan, jika kewajiban itu sudah terpenuhi mereka sudah bebas dari kewajiban lainnya. Pemerintah Hindia Belanda tidak melihat tentang hal itu. Pemerintah Hindia Belanda melihat pada efisiensi dengan menggabungkan beberapa daerah yang secara historis berbeda.

Terdapat pula daerah yang memiliki hubungan dengan pusat karena memiliki hubungan geneologis dengan Raja Bone, bukan pada Watampone sebagai pusat Pemerintahan. Ikatan geneologis ini menjadikan daerah itu memiliki hubungan emosional dan mendapat perlakuan istimewa. Perkawinan adik raja Bone yang ke-2 dengan *arung* di Palakka yang bernama La Patikkeng, adalah upaya untuk memasukkan daerah Palakka sebagai bagian dari Kerajaan Bone yang ketika itu masih berjumlah tujuh wilayah atau daerah. Masuknya Palakka sebagai bagian dari Kerajaan Bone menjadikan Kerajaan Bone semakin besar dan kuat.

Ada pula daerah yang memiliki hubungan dengan pusat Pemerintahan karena daerah itu ditaklukkan. Sebagai daerah yang ditaklukkan, mereka mempunyai kewajiban yang besar, misalnya dengan menyediakan sejumlah orang jika kerajaan dalam bahaya. Mereka tidak saja harus membayar upeti tetapi juga melayani kebutuhan dari kerajaan.³⁸

³⁷ Suriadi Mappangara, *Sejarah Bone*, (Makassar: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sul-Sel, 2003), hlm. 12.

³⁸ *Ibid*, hlm, 22.

Selain itu pula, ada *wanua* yang secara tradisional memiliki hubungan yang sangat kuat dan erat dengan pusat kekuasaan di Watampone karena *wanua-wanua* itu adalah inti dari Kerajaan Bone itu sendiri. *Wanuawanua* itu adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Tidak sedikit juga *wanua-wanua* yang bergabung dalam Kerajaan Bone karena kalah perang yang akhirnya tunduk dalam kekuasaan Kerajaan Bone. Ada juga *wanua* yang tunduk pada kekuasaan pusat karena memiliki hubungan geneologis dengan raja yang berkuasa.

Usaha untuk merangkul elite bangsawan Bone sebenarnya telah dimulai sejak munculnya gerakan-gerakan yang menentang pendudukan Belanda, terutama sejak tahun 1915. Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan mengembalikan struktur Pemerintahan Kerajaan Bone, yaitu membentuk kembali *Dewan Adat Pitu* dan jabatan *To-marilalang*. Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda itu diharapkan dapat meredam gejolak ketidakpuasan dari kalangan bangsawan, baik yang dilakukan secara terbuka maupun secara sembunyi-sembunyi.

Terbentuknya tatanan lama tidak membawa dampak luas seperti yang diharapkan. Jabatan *To-marilalang* yang diciptakan kembali oleh Pemerintah Hindia Belanda tidak sepenuhnya dapat berjalan dengan baik. Jabatan ini dimasa lalu ditempati oleh orang dekat raja yang berfungsi untuk menyebarluaskan putusan raja yang berkaitan dengan kebijakan politik yang diambil oleh raja. Selain itu *Dewan Adat Pitu* yang juga diciptakan kembali tidak sepenuhnya dapat berfungsi karena ia bertugas di bawah pengawasan Pemerintah Hindia Belanda,

dan digaji oleh Pemerintah Hindia Belanda sehubungan dengan tugas yang diberikan kepadanya.³⁹

Pada tahun 1931 *To-marilalang* Bone, Andi Maddusila Daeng Paraga atas nama Dewan Adat Pitu dan seluruh rakyat Bone datang menghadap La Mappanyukki untuk berkenan menjadi raja di Kerajaan Bone. Tawaran itu diterima oleh Andi Mappanyukki. Pemerintah Hindia Belanda kemudian meminta ke Batavia agar seluruh alat-alat kebesaran kerajaan yang dirampas pada waktu penyerbuan pada tahun 1905 dikembalikan ke Kerajaan Bone. Alat-alat kebesaran itu sangat penting karena ia dapat melegitimasikan kedudukan seorang raja.

Diangkatnya Andi Mappanyukki sebagai raja Bone berarti Bone sekarang menjadi satu daerah Swapraja (*Zelfbestuur Landschap*) berdasarkan *Korte Verklaring* yang ditandatangani oleh Andi Mappanyukki. Daerah Soppeng, Wajo dan Bone kemudian dijadikan satu *Afdeling*, di bawah Pemerintahan seorang *Asistent Resident*. Dengan pelantikan Andi Mappanyukki sebagai raja Bone berarti sistem Pemerintahan tradisional sudah dapat dipulihkan kembali.

2.3 Kondisi Sosial

Kerajaan Bone terbentuk karena adanya perjanjian antara ke tujuh penguasa wilayah dengan To-manurung. Perjanjian yang dibangun itu menempatkan To-manurung sebagai raja pertama di Kerajaan Bone. Perjanjian itu merupakan alat legitimasi bagi raja-raja Bone selanjutnya untuk tetap dapat bertahan. Dalam perkembangannya kemudian, muncul dua kelompok. Kelompok pertama dikenal dengan kelompok bangsawan, terdiri atas keturunan *To-*

³⁹ Daud Limbugau, Suriadi Mappangara, *Gerakan Protes Petani Unra*, (Ujung Pandang: Lembaga Penelitian Universitas Hasanuddin, 1991), hlm. 13.

manurung, sedangkan kelompok kedua adalah kelompok orang biasa. Untuk tetap dapat berkuasa, kelompok bangsawan menggariskan beberapa ketentuan yang harus dipatuhi, di antaranya perkawinan. Kelompok bangsawan hanya diperkenankan untuk menikah dengan kelompok bangsawan sendiri.⁴⁰

Sejak Kerajaan Bone mengambil alih peran politik dan kekuasaan Kerajaan Gowa di Sulawesi Selatan pasca Perjanjian Bungaya tahun 1667, wilayah Sulawesi Selatan pada umumnya hampir seluruhnya dikuasai oleh bangsawan Bone. Perkawinan politik yang dilakukan oleh Arung Palakka dengan mengawinkan kemanakannya La Patau dengan puteri penguasa Kerajaan Gowa dan Luwu telah membuat sejarah bangsawan Bone hampir menyebar ke seluruh penjuru Sulawesi Selatan. Jaringan kekuasaan melalui perkawinan antar daerah tersebut memperluas kontrol Bone dan itu berlanjut sampai tahun 1942.⁴¹

Pada waktu Pemerintah Hindia Belanda melakukan Pasifikasi Politik ke daerah-daerah diluar Pulau Jawa, terutama pada masa Pemerintahan Gubernur Jenderal, Van Heustz, Kerajaan Bone menjadi target utama karena dianggap terkuat dan berbahaya. Pada tahun 1905 serangan pun dilancarkan dengan kekuatan penuh tanpa melibatkan kerajaan lokal yang ada di Sulawesi Selatan. Kerajaan Bone takluk kepada Belanda dan para elite bangsawannya dipinggirkan.

Pada tahun 1916, Pemerintah Hindia Belanda memberi Kerajaan Bone status *zelfbestuur*. Para elit bangsawan dirangkul kembali dan diberi tempat untuk menduduki jabatan-jabatan yang selama ini ditiadakan, meskipun harus diketahui

⁴⁰ Suriadi Mappangara, “*Sejarah Bone*”, *Op.Cit*, hlm. 13.

⁴¹ Suriadi Mappangara, “*Bertahannya Bangsawan Bone di Tengah Perubahan Rezim 1811-1946*”, *Op.Cit*, hlm. 192.

bahwa bangsawan yang dirangkul itu adalah mereka yang telah menunjukkan loyalitas yang tinggi. Bagi bangsawan yang dianggap berbahaya tetap disingkirkan. Dalam perkembangan berikutnya bangsawan berhasil membujuk Pemerintah Hindia Belanda untuk mengangkat kembali seorang raja di Kerajaan Bone pada tahun 1931, yang selama ini kosong sejak raja Bone, La Pawawoi Karaeng Segeri, ditangkap pada tahun 1906.⁴²

Pelapisan sosial di Sulawesi Selatan dari 3 bagian yaitu, (1). Arung (Bangsawan), terdiri dari bangsawan murni (Anak ti'no'), bangsawan setengah murni (Anak sipue) dan bangsawan darah (Anak cerak) dan bangsawan rendah (Anak karaeng sala), (2). Tomaradeka/To Decceng (orang biasa dari kalangan menengah yang merdeka), terdiri dari orang baik-baik (Tubajik) dan orang kebanyakan (Tusamarak), (3). Ata (Abdi/Budak), sebagai lapisan bawah yang terdiri dari abdi karena keturunan (Ata sossorang), abdi yang diusir dari lingkungan keluarganya (Ata nibuang) dan abdi yang digadaikan/tidak mampu bayar utang (Tumanggirang).⁴³

Pada masa feodal masyarakat Sulawesi Selatan, dalam menentukan pemimpin penting hukumnya melihat strata sosial, misalnya saja dalam menentukan seorang penguasa maka siapa saja yang memiliki status kebangsawanan tertinggi akan memiliki hak-hak istimewa dalam berkuasa. Hal inilah yang menunjukkan bahwa semua kelompok bangsawan boleh melakukan apa saja termasuk kekuasaan terhadap kelompok dibawahnya seperti To Maradeka

⁴² *Ibid*, hlm. 193.

⁴³ Mattulada, *Latoa: Suatu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*, (Jakarta: Ombak, 2015), hlm. 438.

dan Ata. Ketika sistem Pemerintahan Hindia Belanda diberlakukan secara langsung maka sistem pemilihan penguasa seperti yang diatas masih tetap diberlakukan, namun di samping persyaratan status kebangsawanan, Pemerintah Hindia Belanda juga menambahkan persyaratan lain, yaitu kesediaan agar dapat bekerja sama dengan Pemerintah Hindia Belanda dan mempunyai pendidikan yang memadai.⁴⁴

Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda banyak bangsawan kerajaan yang kehilangan kedudukan kekuasaan karena segala sistem yang diberlakukan Kolonial pada masa itu. Untuk membendung tanggapan itu Pemerintah Hindia Belanda memberlakukan lagi sistem Pemerintahan militer untuk memperkuat dan mempertahankan kedudukan kekuasaannya sehingga siapa saja yang melakukan penolakan atas sistem yang diberlakukan Pemerintah Hindia Belanda dia akan ditawan bahkan akan diasingkan tidak terkecuali kaum bangsawan yang ikut menolak. Sementara kaum bangsawan yang mau bekerjasama dia akan diperbaiki kedudukannya.

Pada masa Kolonial, Pemerintah Hindia Belanda menjalankan sistem tidak langsung (*indirect rule*) dengan tujuan ingin memanfaatkan struktur seefektif mungkin untuk mempertahankan kedudukannya. Dalam sistem yang diterapkannya ini maka lahirlah dua bentuk sistem Pemerintahan yaitu Pemerintahan pribumi dipimpin oleh raja dan Pemerintahan sipil dipimpin oleh Belanda. Setelah pembentukan konfederasi oleh Pemerintah Hindia Belanda maka

⁴⁴ Ummu Faradillah, Munculnya Elite Birokrasi Kolonial di Sulawesi Selatan 1906-1942, (Skripsi: Universitas Hasanuddin, 2018), hlm. 7.

timbullah pemisahan antara bangsawan pusat dan bangsawan daerah di Sulawesi Selatan.⁴⁵

Setelah pndatangananan Pernyataan Pendek atau Korte Verklaring pada tahun 1905. Pemerintahan Hindia Belanda mengubah susunan Pemerintahan Sulawesi Selatan yang mulanya bersistem tradisional menjadi Pemerintahan berdasarkan sistem yang dibuat oleh Belanda. Tersusun dari Pemerintahan Sulawesi dan Daerah Bawahannya (*Gouvernement Celebest en Onderhoorigheden*) diatur secara bertingkat yang terdiri atas Bagian Pemerintahan (*Afdeling*), kemudian cabang Pemerintahan (*Onderafdeling*), Masyarakat Adat (*Adatgemeenschap*) dan kampung (*kampoeng*). Karena adanya sistem Pemerintahan baru inilah yang kemudian menjadikan bentuk kekuasaan Pemerintahan dari beberapa wilayah Bori/Wanua dihapuskan. Walaupun Pemerintah Hindia Belanda menghapus beberapa wilayah di daerah Bori/Wanua, akan tetapi Pemerintah Hindia Belanda telah menggantikannya menjadi Pemerintahan Masyarakat Adat yang masuk dalam susunan Pemerintahan yang dibuatnya. Keaslian dari Bori/Wanua sepenuhnya sudah tidak dapat terlihat lagi.⁴⁶

Masyarakat pendidikan Kolonial di Sulawesi Selatan pada akhir abad ke-19 mengharuskan Pemerintah Hindia Belanda mengubah sistem pendidikan tradisional ke dalam sistem pendidikan Kolonial. Dengan munculnya pendidikan maka lahirlah sebuah golongan yang disebut elit, dimana elit ini berasal dari

⁴⁵ A.A. Gde Putra Agung, *Peralihan Sistem Birokrasi dari Tradisional ke Kolonial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 3.

⁴⁶ Edward, L. Poelinggomang, *Op.Cit*, hlm.3.

bangsawan, orang bisa, dan peranakan yang memihak pada Pemerintah Belanda dan yang nantinya akan dijadikan pegawai dalam perusahaan-perusahaan Belanda.

Pengaruh Pemerintah bagi keberlangsungan hidup dalam lapisan sosial yang ada di Sulawesi Selatan memang sangat besar. Pemerintah terkadang menjadikan ToMaradeka tidak lagi memiliki ketergantungan terhadap kaum bangsawan yang memihak Pemerintah, sehingga dalam sistem Pemerintahan seringkali kaum ToMaradeka lebih tinggi derajat sosialnya dibandingkan dengan kaum bangsawan yang kontra terhadap Pemerintah. Dengan munculnya elit birokrasi yang tidak memandang “darah” secara perlahan menghapuskan sistem kebangsawanan yang selama ini dianut oleh asyarakat Sulawesi Selatan dalam memilih pemimpin.

2.4 Kondisi Ekonomi

Bone yang merupakan salah satu kerajaan yang sangat potensial dalam bidang pertanian maupun perdagangan dikarenakan adanya Pelabuhan Bajoe dan Pallime. Pelabuhan tersebut merupakan akses utama atau bisa dikatakan sebagai tulang punggung perekonomian Kerajaan Bone yang membuat Pemerintah Hindia Belanda ingin menguasai pelabuhan tersebut. Sejak tanggal 22 juni 1905 Pemerintah Hindia Belanda memulai upaya untuk menguasai pelabuhan tersebut dengan mengirimkan surat tuntutan kepada Raja Bone untuk mengatur, mengawasi, dan memungut pajak di Pelabuhan Pallime. Tuntutan tersebut pada akhirnya ditolak oleh Arumpone La Pawawoi Karaeng Sigeri, yang mengakibatkan Pemerintah Hindia Belanda melakukan ekspedisi militer ke Kerajaan Bone dan disambut dengan perlawanan hebat dari Kerajaan Bone.

Peristiwa ini dikenal dengan istilah *Rumpa'na Tana Bone* yang memaksa Kerajaan Bone untuk menandatangani sebuah perjanjian atau dikenal dengan pernyataan pendek (*Korte Verklaring*)

Setelah penandatanganan perjanjian tersebut, Pemerintah Hindia Belanda melalui Gubernur Sulawesi dan Daerah bawahannya (*Celebes en Onderhoorigheden*) menjadikan Bone sebagai daerah taklukan (*Gouvernementlanden*). Pemerintah Hindia Belanda kemudian bebas menata, mengurus, dan melaksanakan Pemerintahan, salah satunya tertuang dalam surat keputusan Gubernur tanggal 2 Desember 1905, No. 34.52, yang berisi pembagian wilayah Bone. Bone pada saat itu dibagi menjadi dua bagian yaitu Bone bagian Selatan atau Bone ri attang dan Bone bagian Utara atau Bone ri awang. Bone ri attang dianggap sebagai *Onderafdeling* baru yang dalam perkebangannya kemudian digabungkan dengan *Afdeling* oosterdisticten berdasarkan keputusan Gubernur tanggal 13 Juli 1906 No. 32.55, sedangkan Bone ri awang wilayahnya terdiri dari kerajaan Lamuru yang merupakan kerajaan taklukan yang kemudian menjadi bagian dari *Afdeling* Bone yang baru.⁴⁷

Sejak masuknya Kolonial Belanda, pajak merupakan sumber utama dalam pengisian kas negara Hindia Belanda, pada tahun 1906-1916 penataan pajak di *Celebes En Onderhoorigheden* (Sulawesi dan daerah bawahannya) masih bersifat sementara, hal ini dapat dilihat dari pembaharuan-pembaharuan yang dilakukan Pemerintah Hindia Belanda, termasuk keluarnya peraturan baru mengenai ordonasi pajak penghasilan (*Ordonantie Inkomstenbelasting*) tahun 1908. Pajak

⁴⁷ *Terjemahan Memori Van Overgave Controlier Bone Riattang tahun 1912-1915, Op.Cit, hlm.50.*

ini sebenarnya bukan merupakan peraturan perpajakan yang baru. Peraturan tersebut merupakan pengembangan dari peraturan pajak yang sudah ada sebelumnya. Yang dikenal dengan Ordonansi Pajak Rumah Tangga tahun 1908.⁴⁸

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa pada masa Kerajaan Bone, raja-raja memiliki kekuasaan yang tak terbatas dalam hal penguasaan lahan maupun tanah. Jadi para bangsawan-bangsawan di Bone dapat menguasai dan mengelola tanah mereka.

⁴⁸ Nadia Ayu Christine, “Latar Belakang Penerapan Ordonansi Pajak Penghasilan di Hindia Belanda tahun 1908-1942”, *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, 2014 Volume 2, No 1), hlm. 140.